

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. PERUMUSAN VISI DAN MISI

Visi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018, tidak terlepas dari Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 , yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bpada Bagian Kelimabelas UPTD pada Dinas Perindustrian pasal 20.

Peran Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada urusan Perindustrian. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan Perindustrian dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2013 – 2018 dan mengacu kepada Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018, maka dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”

Ada tiga kata kunci dalam visi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 - 2018, tersebut, yaitu:

- kata **“masyarakat industri”** : mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah NTB yang bergerak dibidang industri.

- Kata "**unggul**" : mengandung arti memiliki struktur yang kuat, mantap dan inovatif di bidang Industri.
- Kata "**berdaya saing**" : mengandung pengertian komponen-komponen di bidang Industri pelaku usaha yang memiliki kompetensi, inovasi dan kreativitas.

Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang **tanggung jawab** suatu daerah/organisasi/Lembaga yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Tanggung jawab organisasi/ instansi dalam hal ini SKPD melekat secara utuh didalam tugas pokok dan fungsi eselon III (Bidang / Bagian / sekretariat) untuk Lembaga / instansi eselon II, atau tugas pokok dan fungsi eselon IV untuk Lembaga/ instansi eselon III

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas / Instansi lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018, harus mengacu dan relevan dengan pencapaian Misi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018.

Dalam rangka mendukung pencapaian VISI "**Terwujudnya Masyarakat Industri yang unggul dan berdaya saing**" maka Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan **Misi 2013 - 2018** , yang dirumuskan berdasarkan tanggung jawab instansi / Lembaga yang dijabarkan didalam tugas pokok dan fungsi pada eselon III, seperti tergambar pada table 4.1 dibawah ini

Tabel 4.1

Misi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2013 - 2018

NO.	ESELON III	MISI
1.	BIDANG INDUSTRI KREATIF, SANDANG DAN KERAJINAN	Meningkatkan Kemampuan Dan Kemandirian Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan
2.	BIDANG INDUSTRI AGRO	Meningkatkan Kemampuan Dan Kemajuan Industri Agro
3.	BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI,	Meningkatkan Kemampuan Dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan

	ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	Telematika
4.	SEKRETARIAT	Meningkatkan Kelancaran Dan Ketertiban Pelayanan Internal dan Eksternal
5.	BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH	Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan

4.2. PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan **Sasaran** yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat **2013 – 2018** berdasarkan pendekatan **Misi** adalah tergambar pada table- 4.2 sebagai berikut

STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI :

1. Meningkatkan nilai tambah (Added Value) sumber daya alam sepanjang rantai nilai yang berkelanjutan
2. Memperkuat Struktur Industri di Daerah yang memberikan kontribusi terhadap Struktur Industri Nasional
3. Memperkokoh factor-faktor pendukung bagi tumbuhnya sector Industri
4. Memperkuat Kemampuan dan peran Industri Kecil dan Menengah
5. Menjalani Sinergitas program/kegiatan yang komprehensif antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2013 – 2018

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINEREJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA USAHA KECIL	1.1	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil se cara berkesinambungan	Jumlah Unit usaha dengan daya dukung sarana memadai	Unit/ Th				370	410
		1.2	Terlatihnya pelaku usaha sesuai kebutuhan							
		1.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai							
2	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK USAHA KECIL	2.1	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan	Jumlah daya serap tenaga kerja yang terserap oleh industri kecil	Orang/ Th	1.120	1.240	1.360	1.480	1.640
		2.2	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil							
		2.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai							
3	MENINGKATNYA INTENSITAS PENGEMBANGAN POTENSI DAN KERJASAMA INDUSTRI USAHA KECIL	3.1	Tersedianya sarana dan prasarana kluster industri yang memadai	Jumlah investasi Industri Kecil	Rp. (000.000)/ Th	4.200	4.650	5.100	5.600	6.250
		3.2	Tersedianya hasil kajian potensi-potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang lengkap							
		3.3	Tersedianya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) secara terpadu							
4	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI AGRO DAN KIMIA	4.1	Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Agro dan Kimia secara berkesinambungan	Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Agro dan Kimia	Unit Usaha/ Th	120	125	130	138	140
		4.2	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil							
		4.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai							

5	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI LOGAM DAN MESIN	5.1	Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Logam dan Mesin secara berkesinambungan	Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Logam dan Mesin	Unit Usaha/ Th	40	50	58	65	75
		5.2	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil							
		5.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai							
6	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA	6.1	Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Alat Transportasi dan Telematika secara berkesinambungan	Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Transportasi dan Telematika	Unit Usaha/ Th	14	16	20	24	30
		6.2	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil							
		6.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai							
9	MENINGKATNYA KUALITAS DAN LEGALITAS PRODUK PERDAGANGAN	9.1	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan	Jumlah investasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UKM)	Rp. (000.000)/ Th	71.442	75.014	78.765	82.703	86.838
		9.2	Tersedianya fasilitas penunjang pengurusan ijin usaha							
11	MENINGKATNYA KONTINUITAS DAN AKSESSIBILITAS IMPOR BARANG	11.1	Terawasanya peredaran barang impor secara rutin	Jumlah Nilai Impor	US \$	217.066	234.214	252.951	273.693	296.410
		11.2	Terlatihnya pelaku usaha impor barang							
		11.3	Tersedianya hasil evaluasi dan monitoring importir yang sudah memiliki API							
12	MENINGKATNYA INTENSITAS DAN KUALITAS PROMOSI DAN INFORMASI EKSPOR BARANG	12.1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Jumlah Negara Tujuan	Negara	16	17	18	19	20
		12.2	Tersedianya prosedur ekspor bagi pengusaha yang baku							
		12.3	Terselenggaranya promosi dan informasi ekspor secara rutin							
		12.4	Terawasanya mutu barang ekspor secara baik							
13	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	13.1	Terwujudnya dokumen perencanaan yang benar	Jumlah Laporan Kinerja	Dokumen/ Th	12	12	12	12	12
		13.2	Terwujudnya laporan yang lengkap							

		13.3	Tersedianya pustaka dan data yang memadai							
		13.4	Terwujudnya penerimaan daerah sesuai target	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen/ Th	12	12	12	12	12
		13.5	Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar							
14	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	14.1	Terkirimnya pegawai mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional	Jumlah Laporan Kinerja Aparatur	Dokumen/ Th	12	12	12	12	12
		14.2	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja							
		14.3	Terwujudnya administrasi kepegawaian, sarana surat menyurat, arsip, dll yang tertib							
15	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS ADMINISTRASI BALAI	16.1	Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap	Jumlah Laporan administrasi yang Diselesaikan	Laporan/ Th	12	12	12	12	12
		16.2	Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid							
		16.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai							
23	MENINGKATNYA KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	23.1	Terlatih dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan	Jumlah produk yang dihasilkan setelah Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Pengolahan Industri Makanan, Minuman, dan Kerajinan	Unit/ Th	8	12	15	17	20
		23.2	Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang profesional							
		23.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai							
24	MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	24.1	Terlaksananya bimbingan teknis secara terpadu	Jumlah produk yang dihasilkan setelah dilatih Peningkatan Mutu Kemasan Produk Industri Makanan, Minuman dan Kerajinan	Unit/ Th	20	30	40	50	60
		24.2	Tersedianya tenaga kerja yang profesional							
		24.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai							

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2013 – 2018

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINEREJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INDUSTRI KREATIF	1.1	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kreatif secara berkesinambungan	Jumlah usaha Industri kreatif yang terfasilitasi	IKM				135	150
		1.2	Terlatihnya pelaku usaha industri kreatif yang terampil							
		1.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai							
2	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INDUSTRI SANDANG DAN KERAJINAN	2.1	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil sandang dan kerajinan secara berkesinambungan	Jumlah usaha industri sandang dan kerajinan yang terfasilitasi	IKM				48	120
		2.2	Terwujudnya pelaku industri sandang dan kerajinan yang terampil							
		2.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai							
3	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, HASIL LAUT, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	3.1	Terbina dan tersuluhnya industri makanan dan minuman, hasil laut perikanan dan peternakan yang berkesinambungan	Jumlah Industri makanan dan minuman, hasil laut, perikanan dan peternakan yang terfasilitasi	IKM				80	200
		3.2	Terwujudnya pelaku industri makanandan minuman, hasil laut perikanan dan peternakan yang terampil							
		3.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha, dan peralatan yang memadai							
4	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI HASIL	4.1	Terbina dan tersuluhnya Industri hasil pertanian, Hutan dan Perkebunan secara berkesinambungan	Jumlah Industri hasil pertanian, Hutan dan perkebunan yang	IKM				60	180

	PERTANIAN, HUTAN DAN PERKEBUNAN	4.2	Terwujudnya pelaku usaha industry hasil pertanian, hutan dan perkebunan yang terampil	dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Agro						
		4.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai							
5	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN ALAT TRANSPORTASI	5.1	Terbina dan tersuluhnya pengrajin Industri Logam , Mesin dan alat transportasi secara berkesinambungan	Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Logam, Mesin dan alat transportasi	IKM				348	450
		5.2	Terwujudnya pelaku usaha industry logam, mesin dan alat transportasi yang terampil							
		5.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal dan peralatan yang memadai							
		5.4	Terdampinginya IKM Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi							
		5.5	Terjalannya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan UPT di bidang Industri Logam, Mesin dan alat transportasi							
6	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA	6.1	Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Telematika dan Elektronika secara berkesinambungan	Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Elektronika dan Telematika	IKM				55	100
		6.2	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil							
		6.3	Tersedianya fasilitas penunjang dan peralatan yang memadai							
		6.4	Terlaksananya proses pendampingan bagi IKM industry Elektronika dan telematika							
		6.5	Terjalannya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan UPT di Bidang Industri Elektronika dan Telematika							
7	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	7.1	Terwujudnya dokumen perencanaan yang baik dan benar	Jumlah Laporan Kinerja	Dokumen/ Th				12	12
		7.2	Terwujudnya laporan yang lengkap							
		7.3	Terwujudnya pustaka dan data yang memadai							
		7.4	Terpublikasinya informasi Perindustrian secara rutin	Jumlah informasi yang ditayangkan di website perindustrian	Bulan				12	12

		7.5	Terwujudnya promosi secara terpadu	Jumlah event promosi yang diikuti	event				6	6
		7.6	Terwujudnya data aset yang baik dan benar	Jumlah Laporan aset dan Keuangan	Dokumen/Th				12	12
		7.7	Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar							
8	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8.1	Terkirimnya pegawai mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional	Jumlah Laporan Kinerja Aparatur	Dokumen/Th				12	12
		8.2	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja							
		8.3	Terwujudnya administrasi kepegawaian, sarana surat menyurat, arsip, dll yang tertib							
9	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS ADMINISTRASI BALAI	9.1	Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap	Jumlah Laporan administrasi yang Diselesaikan	Laporan/Th				12	12
		9.2	Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid							
		9.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai							
10	MENINGKATNYA KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	10.1	Terlatih dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan	Jumlah produk yang dihasilkan setelah Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Pengolahan Industri Makanan, Minuman, dan Kerajinan	Unit/ Th				17	20
		10.2	Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang profesional							
		10.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai							
11	MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	11.1	Terlaksananya bimbingan teknis secara terpadu	Jumlah produk yang dihasilkan setelah dilatih Peningkatan Mutu Kemasan Produk Industri Makanan, Minuman dan Kerajinan	Unit/ Th				50	60
		11.2	Tersedianya tenaga kerja yang profesional							
		11.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai							

4.3. PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan

Strategi dapat dikelompokkan berdasarkan sasaran

- a. Penyebaran / Penyampaian Informasi
 Sosialisasi, Konsolidasi, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi
- b. Pengelolaan Sumber Daya / Potensi
 Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Investasi, Divestasi, Mobilisasi dan Regenerasi, Rejuvenasi
- c. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi (KISS), Sinergi
- d. Penataan Kelembagaan / Organisasi
 Rasionalisasi, Revitalisasi, Restrukturisasi, Reorganisasi, Rekonstruksi, Akreditasi, Reposisi, Ratifikasi , Rekonsiliasi
- e. Penataan Aturan (Pengaturan)
 Desentralisasi, Deregulasi, Deliberalisasi, dekonsentrasi, Sentralisasi
- f. Pengembangan Pelayanan Dan Pemberdayaan
 Renovasi, Rekonsiliasi, Revolusi, Reformasi, Redistribusi
- g. Pengembangan Pertahanan Keamanan Dan Ketertiban
 Invasi, Infiltrasi, Interogasi, Indoktrinasi, Provokasi,

Untuk merumuskan strategi ditempuh melalui analisis SWOT yaitu analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan lingkungan eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

KEBIJAKAN pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan ,dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Table 4.3
Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi
Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018

SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
1.1.1.	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kreatif secara berkesinambungan	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait
1.1.2.	Terlatihnya pelaku usaha industry kreatif yang terampil		Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
1.1.3.	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai		Membangun Sistem klaster berbasis <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan Sentra
1.2.1.	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil sandang dan kerajinan secara berkesinambungan	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Penanaman modal berbasis Green Investment Industri
1.2.2.	Terwujudnya pelaku usaha yang Industri sandang dan kerajinan yang terampil		Mengembangkan sistem informasi Industri dengan Pemerintah se-Kabupaten/ Kota
1.2.3.	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai		
2.1.1.	Terbina dan tersuluhnya usaha industri hasil pertanian, Hutan dan perkebunan secara berkesinambungan	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Pengembangan Sistem Klaster Industri
2.1.2.	Terwujudnya pelaku usaha industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan yang terampil		Pengembangan Dektor Industri melalui Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)
2.1.3.	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai		Meningkatkan jejaring kerjasama dengan Asosiasi, Perusahaan Besar, BUMN/ BUMD.
2.2.1	Terbina dan tersuluhnya pengerajin industri makanan dan minuman, hasil laut perikanan dan peternakanyang berkesinambungan	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	
2.2.2	Terwujudnya pelaku usaha insutri makanan dan minuman, hasil laut perikanan dan peternakan yang terampil		
2.2.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha dan peralatan yang memadai		
3.1.1.	Terbina dan tersuluhnya pengerajin industri Logam, Mesin, dan alat transportasi secara berkesinambungan	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait
3.1.2.	Terwujudnya pelaku usaha industri logam, mesin dan alat transportasi yang terampil		Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
3.1.3.	Tersedianya fasilitas penunjang dan peralatan yang memadai		Penanaman modal berbasis Green Investment
3.1.4	Terdampinginya IKM Industri Logam, Mesin dan alat Transportasi		
3.1.5	Terjalannya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan UPT di Bidang Industri Logam, Mesin dan alat transportasi		
3.2.1	Terbina dan tersuluhnya usaha industri Telematika dan Elektronika secara berkesinambungan	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Penanaman modal berbasis Green Investment
3.2.2	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil		

3.2.3.	Tersedianya fasilitas penunjang dan peralatan yang memadai		
3.2.4	Terlaksananya proses pendampingan bagi IKM industri elektronika dan telematika		
3.2.5	Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan UPT di bidang Industri Elektronika dan Telematika		
4.1.1.	Terwujudnya dokumen perencanaan yang baik dan benar	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Meningkatkan kerjasama dengan Dinas/ Instansi lain tentang program sektor Indag.
4.1.2.	Terwujudnya laporan yang lengkap		Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana informasi dan teknologi secara berkala
4.1.3.	Terpublikasinya informasi Perindustrian secara rutin		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui diklat dan pelatihan
4.1.4.	Terwujudnya pustaka dan data yang memadai		Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi Sumber Daya Manusia di bidang Kemetropolitan
4.1.5.	Terwujudnya laporan Keuangan yang baik dan benar		Melakukan Desiminasi/ Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk tertib ukur dan tertib niaga
4.1.6	Terwujudnya data aset yang baik dan benar		
4.1.7	Terselenggaranya promosi secara terpadu		
4.2.1.	Terkirimnya pegawai mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional		
4.2.2.	Terwujudnya sarana dan prasarana kerja yang baik		
4.2.3.	Terwujudnya administrasi kepegawaian, surat menyurat dan arsip dll yang tertib		
5.1.1.	Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait
5.1.2.	Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid		Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
5.1.3.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yg memadai		Kerjasama dengan lembaga Luar negeri
5.2.1.	Terlatihnya dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan		Membangun Sistem klaster berbasis <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan Sentra
5.2.2.	Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang professional		Penanaman modal berbasis Green Investment
5.2.3.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai		Mengembangkan sistem informasi penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (SPIPISE)
5.3.1.	Terlaksananya Bimbingan teknis secara terencana dan terpadu		Mengembangkan pelayanan penanaman modal secara terpadu (PTSP)
5.3.2.	Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang professional dibidangnya		
5.3.3.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai		

KETERKAITAN ANTARA ISU STRATEGIS, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT PRIODE 2013 – 2018

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING "

ISU STRATEGIS : Industrialisasi dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas serta Kualitas IKM			
MISI I : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INDUSTRI KREATIF	1.1.1 Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kreatif secara berkesinambungan	Koordinasi; Konsultasi;	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait
	1.1.2 Terlatihnya pelaku usaha industri kreatif yang terampil	Inventarisasi; Investigasi;	Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
	1.1.3 Terlatihnya tenaga industri kreatif	Edukasi; Fasilitasi;	
1.2 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INDUSTRI SANDANG DAN KERAJINAN	1.2.1 Terbina dan tersuluhnya industri kecil sandang dan kerajinan secara berkesinambungan	Negosiasi	Membangun Sistem kluster berbasis <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan Sentra;
	1.2.2 Terwujudnya pelaku industri sandang dan kerajinan yang terampil		Penanaman modal berbasis Green Investment
	1.2.3 Terlatihnya tenaga industri sandang dan kerajinan		

ISU STRATEGIS : Hilirisasi Industrialisasi Agro			
MISI II : Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agro			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2.1 MENINGKATNYA KUALITAS, KUANTITAS DAN KAPASITAS PRODUK INDUSTRI HASIL PERTANIAN, HUTAN DAN PERKEBUNAN	2.1.1 Terbina dan tersuluhnya pengerajin industri hasil pertanian, Hutan dan Perkebunan secara berkesinambungan	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota Membangun Sistem kluster berbasis <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan Sentra;
	2.1.2 Terwujudnya pelaku usaha industry hasil pertanian, hutan dan perkebunan yang trampil		
	2.1.3 Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai		
2.2 MENINGKATNYA KUALITAS, KUANTITAS DAN KAPASITAS INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, HASIL LAUT, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	2.2.1 Terbina dan tersuluhnya pengerajin induti makanan dan minuman, hasil laut perikanan dan Peternakan yang berkesinambungan		Penanaman modal berbasis Green Investment
	2.2.2 Terwujudnya pelaku usaha yang trampil		
	2.2.3 Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha , dan peralatan memadai		
2.3 MENINGKATNYA AKSES PEMASARAN PRODUK OLAHAN INDUSTRI AGRO	2.3.1 Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industry Agro		
	2.3.2 Terwujudnya pelaku usaha yang trampil		
	2.3.3 Tersedianya fasilitas pemasaran produk olahan Industri Agro yang memadai		
	2.3.4 Produk Olahan Industri Agro dipasarkan di Retail Modern		

ISU STRATEGIS : Belum Optimalnya penguatan kapasitas, kapabilitas serta kualitas IKM Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika			
MISI III : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3.1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN ALAT TRANSPORTASI	3.1.1 terbina dan tersuluhnya pengerajin industry Logam, Mesin dan alat transportasi	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota Penanaman modal berbasis Green Investment Bantuan peralatan dan mesin
	3.1.2 Terlatihnya pelaku usaha Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi yang terampil		
3.1.3 Tersedianya fasilitas penunjang dan peralatan yang memadai			
3.1.4 Terdampinginya IKM Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi			
3.1.5 Terjalannya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan UPT di bidang Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi			
3.2 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	3.2.1 Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri Elektaronika dan telematika;		
	3.2.2 Terlatihnya pelaku usaha terampil		
	3.2.3 Tersedianya fasilitas penunjang dan peralatan yang memadai		
	3.2.4 Terlaksananya proses pendampingan bagi IKM Industri Elektornika dan Telematika		
	3.2.5 Terjalannya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan UPT di Bidang Industri Elektronika dan Telematika		

ISU STRATEGIS : Sarana dan prasarana penunjang pelayanan internal			
MISI IV : Meningkatkan Kelancaran Dan Ketertiban Pelayanan Internal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4.1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM DAN KEUANGAN	4.1.1 Terwujudnya dokumen perencanaan yg benar	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
	4.1.2 Terwujudnya laporan yg lengkap		
	4.1.3 Terpublikasinya informasi teknologi secara rutin		
	4.1.4 Tersedianya pustaka dan data yg memadai		
	4.1.5 Terwujudnya penerimaan daerah sesuai target		
	4.1.6 Terwujudnya laporan Keuangan yang baik dan benar		
4.2 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS ADMINISTRASI UMUM	4.2.1 Terkirimnya pegawai mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional		
	4.2.2 Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja;		
	4.2.3 Terwujudnya administrasi kepegawaian, surat menyurat dan arsip dll yg tertib		

ISU STRATEGIS : Mutu dan Kemasan Produk Olahan			
MISI V : Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
5.1 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ADMISITRASI BALAI	5.1.1 Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota Penanaman modal berbasis Green Investment
	5.1.2 Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid		
	5.1.3 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yg memadai		
5.2 MENINGKATNYA KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	5.2.1 Terlatihnya dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan		
	5.2.2 Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang profesional		
	5.2.3 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai		
5.3 MENINGKATNYA KUALITAS KEMASAN PRODUK INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	5.3.1 Terlaksananya Bimbingan teknis secara terpadu		
	5.3.2 Tersedianya tenaga kerja yang profesional		
	5.3.3 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Teknologi Proses yang memadai		
	5.3.4 Terfasilitasinya kemasan pelaku usaha IKM yang sesuai untuk kebutuhan retail modern		